



# Strategi Percepatan Transformasi Ekonomi

# B A B IV



Berbagai kebijakan perlu terus ditempuh guna memperkuat struktur perekonomian dan mempercepat transformasi ekonomi sehingga membawa Indonesia menuju negara maju dalam jangka menengah-panjang. Upaya melakukan transformasi ekonomi ditempuh melalui penguatan beberapa sektor-sektor unggulan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, di antaranya sektor manufaktur, pariwisata, dan ekonomi keuangan syariah. Transformasi ekonomi juga diperkuat dengan kebijakan pendalaman pasar keuangan sebagai basis dalam mendukung sumber pembiayaan ekonomi.

---

## “Transformasi ekonomi meliputi penguatan peran sektor-sektor prioritas yang dapat memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian”

---

### **Transformasi ekonomi menjadi prakondisi penting untuk membawa Indonesia berada dalam kelompok negara berpendapatan tinggi pada 2045.**

Transformasi ekonomi antara lain meliputi penguatan peran sektor-sektor prioritas yang dapat memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian. Sektor prioritas meliputi sektor yang tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat mendukung ketahanan eksternal melalui peningkatan kinerja neraca transaksi berjalan. Sejalan dengan hal tersebut, transformasi ekonomi juga berkaitan dengan penguatan sektor produksi melalui peningkatan investasi. Peningkatan nilai tambah perekonomian juga didukung oleh pemberdayaan optimal berbagai sumber daya domestik sebagai faktor produksi, serta penguatan berbagai infrastruktur pendukung, termasuk di sektor keuangan.

### **Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat mempercepat proses transformasi ekonomi Indonesia sebagai negara maju.**

Penguatan sektor manufaktur ditempuh melalui *two-pronged approach*, yakni meningkatkan peran industri manufaktur untuk menopang kinerja ekspor dan meningkatkan nilai tambah. Penguatan peran sektor manufaktur ini dilakukan melalui strategi *end-to-end* yang bersifat menyeluruh, terintegrasi dan inklusif. Penguatan manufaktur ditempuh

secara menyeluruh kepada tiap industri mulai dari pembenahan faktor produksi, regulasi dan kelembagaan, hingga akses pasar. Penciptaan integrasi antarsektor dan wilayah juga menjadi strategi kunci sehingga tercipta *local value chain* yang kuat. Selain itu, penguatan manufaktur juga bersifat inklusif sehingga berdampak luas kepada perekonomian.

### **Selain sektor manufaktur, transformasi ekonomi juga ditempuh melalui pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber penghasil devisa dan pertumbuhan ekonomi baru.**

Pengembangan sektor pariwisata diharapkan akan mendukung upaya perbaikan defisit transaksi berjalan melalui peningkatan perolehan devisa. Dalam kaitan ini, sektor pariwisata perlu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, ditopang oleh potensi destinasi wisata yang berkualitas dan daya saing pariwisata yang membaik. Upaya peningkatan peran sektor pariwisata ditempuh melalui pendekatan 3A2P (Akses, Atraksi, Amenitas, Pelaku dan Promosi) yang didukung sinergi kebijakan antarotoritas terkait. Penerapan pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing pariwisata Indonesia sehingga lebih kompetitif dibandingkan dengan negara *peers*. Ke depan, transformasi pariwisata akan tetap berlanjut dan difokuskan pada penguatan 3A2P di

destinasi superprioritas dan destinasi unggulan lainnya.

### **Optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah dan percepatan pendalaman pasar keuangan turut berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi.**

Pengembangan ekonomi syariah dilakukan melalui peningkatan peran industri halal dan pariwisata ramah muslim, yang pada gilirannya turut meningkatkan permintaan terhadap pembiayaan berprinsip syariah. Strategi ini ditempuh secara terintegrasi melalui pengembangan ekosistem *halal value chain*, didukung oleh pembiayaan syariah sekaligus peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Ke depan, transformasi ekonomi dan keuangan syariah akan tetap diarahkan melalui pendekatan ekosistem, didukung oleh komitmen Pemerintah. Sementara itu, percepatan pendalaman pasar keuangan turut berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi. Upaya tersebut dilakukan secara sinergis oleh Bank Indonesia dan otoritas terkait dengan fokus pada pengembangan sumber pembiayaan dan pengelolaan risiko, pengembangan infrastruktur pasar keuangan, dan pembentukan kerangka regulasi. Pendalaman pasar keuangan juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah.

## 4.1

# Manufaktur untuk Memperkuat Struktur Perekonomian

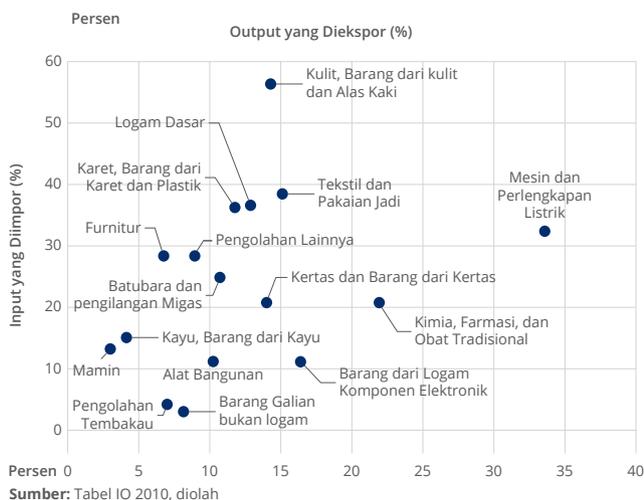
**Transformasi ekonomi menuju negara maju berpendapatan tinggi perlu ditopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan agar Indonesia dapat terlepas dari *middle income trap*.**

Saat ini, Indonesia masih berada pada kelompok negara berpendapatan menengah (*middle income country*) dengan pendapatan per kapita sebesar 3.840 dolar AS. Perkembangan ini perlu terus dipacu sehingga Indonesia dapat menuju kelompok negara berpendapatan tinggi. Berdasarkan proyeksi ekonomi jangka menengah panjang, Indonesia diperkirakan akan keluar dari kelompok *middle income country* dan masuk dalam kelompok *high income country* pada 2045 dengan pendapatan per kapita di atas 12.376 dolar AS.

**Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut penting dilakukan dengan mempertimbangkan struktur ekonomi Indonesia yang perlu terus diperkuat.**

Struktur ekspor saat ini didominasi oleh komoditas primer dan produk berbasis sumber daya alam (SDA), sehingga rentan terhadap gejolak harga komoditas global.

**Grafik 4.1.** Hubungan Impor dan Ekspor Industri Manufaktur



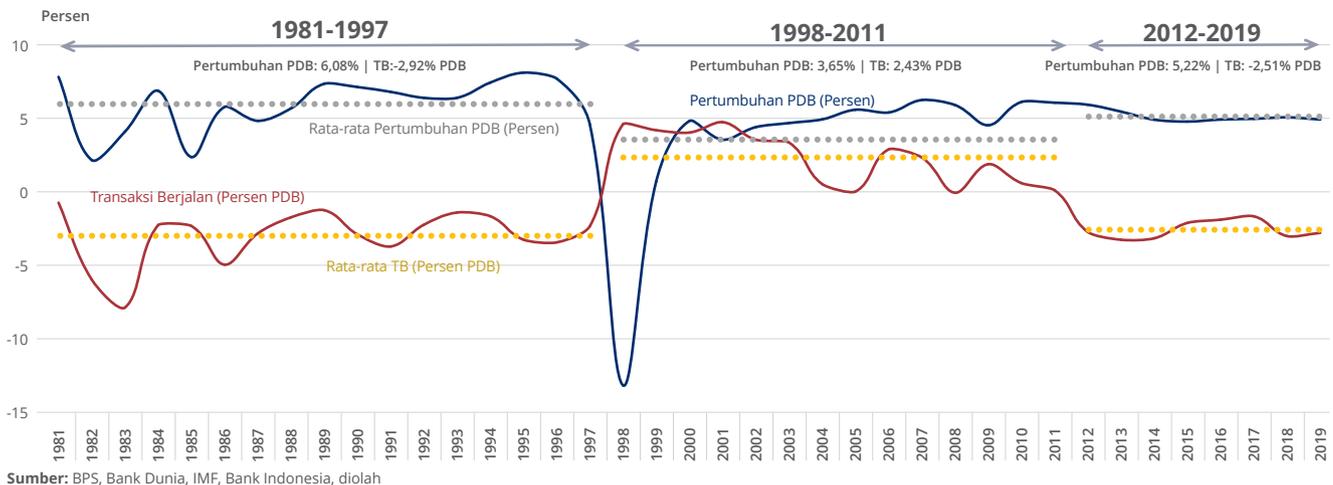
Sebagian besar bahan baku dalam kegiatan produksi domestik, termasuk untuk ekspor, juga masih bergantung pada impor (Grafik 4.1). Kondisi ini memberikan tantangan karena peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong kenaikan impor sehingga berdampak pada peningkatan defisit transaksi berjalan (Grafik 4.2). Perkembangan ini berimplikasi pada pentingnya penguatan struktur neraca barang dan neraca jasa, baik dari sisi ekspor maupun sisi impor, agar ekonomi dapat tumbuh berkesinambungan.

**Sektor manufaktur memegang peranan strategis untuk memperkuat struktur ekonomi, termasuk memperkuat kinerja ekspor.** Jika dibandingkan dengan sejumlah negara *peers*, negara-negara yang mencatat pangsa surplus neraca barang terhadap PDB yang lebih tinggi, umumnya ditopang oleh pangsa ekspor manufaktur. Hal itu terlihat dari pangsa ekspor manufaktur negara *peers* yang mencapai lebih dari 60% (Grafik 4.3). Angka ini lebih tinggi dari Indonesia yang baru mencapai 44% dari PDB, sehingga perlu terus didorong. Selain itu, ekspor Indonesia yang masih didominasi komoditas primer juga perlu diarahkan untuk lebih bernilai tambah tinggi agar lebih berdaya tahan terhadap gejolak eksternal.

**Upaya mempercepat transformasi sektor manufaktur juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah.** Hal ini sejalan dengan kebijakan reformasi struktural Pemerintah yang juga memfokuskan pada pengembangan sektor manufaktur. Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu strategi utama transformasi ekonomi diarahkan untuk menurunkan ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam (SDA) ke arah industri manufaktur dan jasa yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi.<sup>1</sup> Untuk itu, diperlukan upaya pengembangan industri

1 Penjelasan secara rinci mengenai kebijakan reformasi struktural terdapat pada Bab 2 subbab 2.3.

**Grafik 4.2.** Pertumbuhan Ekonomi dan Neraca Transaksi Berjalan



Sumber: BPS, Bank Dunia, IMF, Bank Indonesia, diolah

domestik untuk meningkatkan nilai tambah industri melalui hilirisasi produk SDA. Upaya hilirisasi tidak hanya mendukung penguatan struktur ekonomi, tapi juga mendukung integrasi antarsektor dan antarwilayah. Melalui hilirisasi, kawasan luar Jawa dapat memasok bahan baku bagi industri di Jawa yang saat ini bergantung pada impor, sehingga mendukung perbaikan defisit transaksi berjalan.

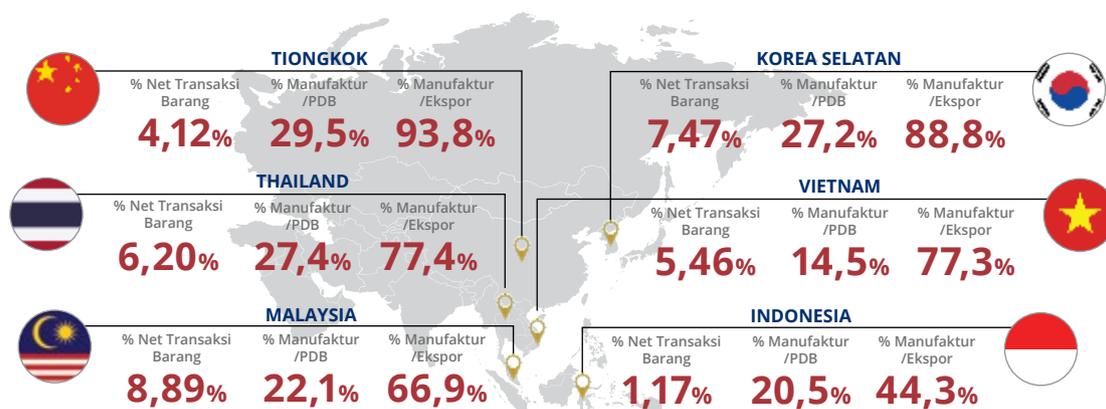
**Untuk mendukung transformasi manufaktur, strategi penguatan industri manufaktur perlu ditempuh**

**melalui two pronged approach dan dilakukan secara bertahap mempertimbangkan industri prioritas.** Secara umum, strategi untuk memperkuat struktur industri manufaktur tersebut diarahkan untuk (i) mendorong industri yang berdaya saing tinggi sehingga menopang prospek ekspor, dan (ii) mendorong pengembangan industri yang mendukung peningkatan nilai tambah, serta industri lainnya yang berpotensi mempunyai daya saing. Dalam implementasinya, *two pronged approach* dilakukan secara *end-*

*to-end*, yakni bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif (Gambar 4.1).

**Untuk pendekatan pertama, penguatan industri manufaktur diarahkan untuk mendorong industri yang berdaya saing tinggi sehingga menopang prospek ekspor.** Untuk mendukung tujuan tersebut, penguatan pada tahap awal dapat dilakukan melalui penentuan industri prioritas yang telah berdaya saing tinggi, diikuti dengan surplus kinerja perdagangan. Hal ini pada gilirannya akan mendukung optimalisasi perolehan devisa

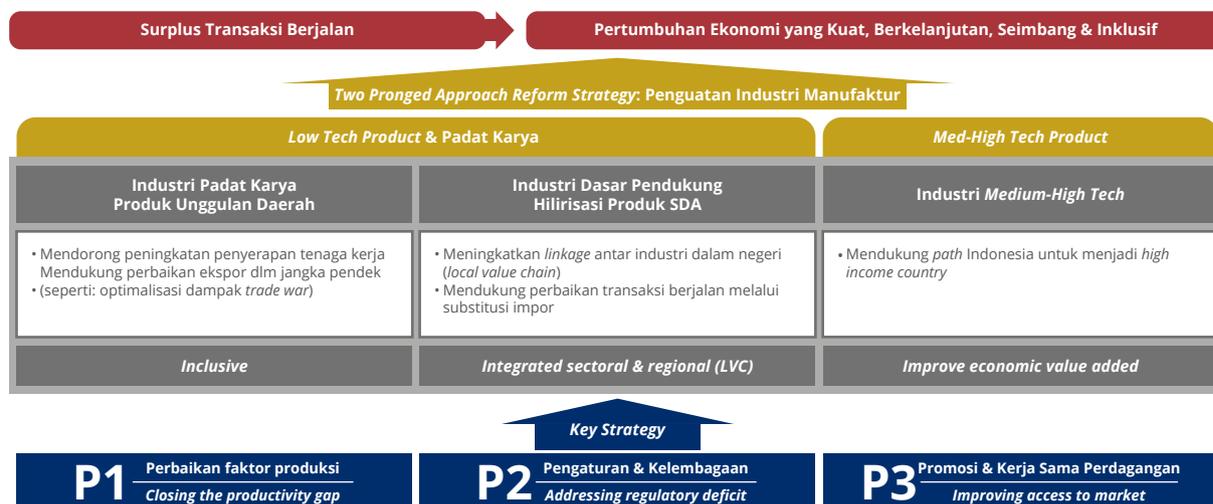
**Grafik 4.3.** Peran Ekspor Manufaktur pada Perekonomian



Ket: - % manufaktur terhadap ekspor merupakan data *Manufactures exports* (% of merchandise exports) dari World Development Indicator, Bank Dunia.  
- Rata-rata 5 Tahun terakhir (2014-2018), kecuali Vietnam (2013-2017)

Sumber: Bank Dunia, diolah

Gambar 4.1. Strategi Penguatan Industri Manufaktur ‘Two Pronged Approach’



dalam jangka pendek. Hasil pemetaan komoditas ekspor berdasarkan tingkat daya saing dan kinerja perdagangan menunjukkan bahwa strategi pengembangan industri manufaktur dapat difokuskan pada sejumlah industri.<sup>2</sup> Beberapa industri yang dapat dijadikan prioritas, antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, otomotif, serta industri makanan dan minuman, khususnya perikanan dan kopi.

**Pendekatan kedua diarahkan untuk mendorong pengembangan industri yang mendukung peningkatan nilai tambah, serta industri lainnya yang berpotensi mempunyai daya saing.** Pendekatan ini dilakukan

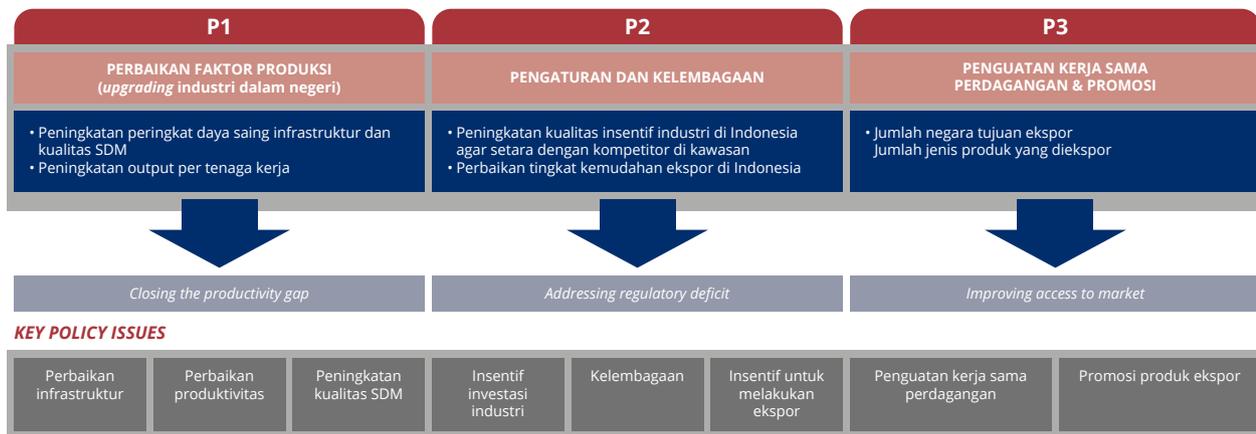
dengan pertimbangan kapasitas dan kapabilitas industri manufaktur domestik yang belum optimal, sehingga sebagian bahan baku dalam kegiatan produksi domestik masih bergantung pada impor. Integrasi rantai pasokan bahan baku antarkawasan dalam rantai produksi (*local value chain*) yang masih perlu ditingkatkan menjadi salah satu faktor penyebab kapasitas dan kapabilitas industri manufaktur domestik yang perlu lebih dioptimalkan. Industri yang sebagian besar terpusat di Jawa memiliki integrasi yang terbatas dengan wilayah lain sebagai pemasok input antara. Hal ini disebabkan oleh kapasitas industri pemasok yang terbatas dan perbedaan spesifikasi produk industri pendukung domestik dengan spesifikasi produk yang dibutuhkan, sehingga perlu ditopang oleh impor bahan baku dalam jumlah tinggi. Oleh karena itu, peningkatan *local value chain* dari industri pendukung di sejumlah wilayah perlu terus diupayakan secara bertahap

hingga jangka menengah. Melalui upaya tersebut, ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor diharapkan dapat semakin ditekan dan mendukung ketahanan eksternal. Selain untuk meningkatkan nilai tambah, strategi ini juga perlu diarahkan untuk mengembangkan industri lainnya yang berpotensi memiliki daya saing. Industri lainnya ini merupakan industri yang berperan penting dan menjadi sumber pendapatan utama perekonomian daerah.

**Pada tataran implementasi, strategi kebijakan transformasi manufaktur dilakukan secara end-to-end, karena dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif.** Penguatan industri manufaktur dilakukan dengan mengatasi kendala utama secara menyeluruh, baik dari sisi faktor produksi, faktor pendukung iklim usaha, maupun faktor akses pasar. Strategi pengembangan juga perlu dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan bahwa industri yang terpusat di Jawa semakin terintegrasi dengan industri pendukung di luar Jawa, sehingga ketergantungan terhadap impor bahan baku dapat semakin menurun. Upaya peningkatan nilai tambah turut mendukung integrasi antarsektor dan antarwilayah, sehingga spesifikasi produk industri pendukung domestik di luar Jawa sesuai dengan kebutuhan industri di Jawa. Selain itu, strategi pengembangan juga harus bersifat inklusif, yakni berdampak luas ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pengembangan seperti kluster UMKM serta pengembangan inovasi melalui pembangunan pusat teknologi dan inovasi sebagai *public goods* yang hasilnya dapat dirasakan secara luas dan bersifat inklusif menjadi penting dalam strategi transformasi manufaktur ini.

2 Hasil pemetaan dapat dilihat pada Grafik 1.10.

Gambar 4.2. Strategi *End-to-End* Penguatan Industri Manufaktur



**Implementasi strategi kebijakan transformasi manufaktur dilakukan secara menyeluruh berdasarkan pada kerangka 3P.** Secara garis besar, kerangka 3P yang diadopsi dari *trade competitiveness diagnostic* untuk memudahkan upaya identifikasi kendala utama dalam memperkuat industri manufaktur (Gambar 4.2). Kerangka 3P terdiri dari (i) perbaikan faktor produksi guna memperkecil *productivity gap*, (ii) pengaturan dan kelembagaan yang mampu mengurangi *regulatory deficit* yang kerap menjadi penghalang masuknya investasi, serta (iii) penguatan kerja sama perdagangan dan promosi guna meningkatkan akses ke pasar global.<sup>3</sup>

Untuk “P” pertama terkait perbaikan faktor produksi, strategi yang didukung oleh kualitas infrastruktur, layanan logistik, dan pendidikan vokasi diarahkan untuk mengatasi kesenjangan produktivitas. Strategi ini mencakup upaya meningkatkan daya dukung infrastruktur kepada pengembangan industri hulu dan

kebijakan pendidikan vokasi akan diarahkan pada peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

**Pengembangan industri manufaktur juga perlu didukung strategi pengembangan zona industri guna mendukung efisiensi.** Strategi pengembangan industri manufaktur

“Strategi pengembangan industri manufaktur dalam satu Kawasan Industri atau Zona Wilayah Industri yang terintegrasi menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi”

dalam satu Kawasan Industri atau Zona Wilayah Industri yang terintegrasi menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi. Pengembangan kawasan tersebut akan diintegrasikan dengan

antara guna memperkuat keterkaitan antarindustri domestik, sehingga mendorong peningkatan *local value chain*. Perbaikan konektivitas juga diarahkan untuk mendukung efisiensi rantai logistik sehingga meningkatkan daya saing industri dari sisi biaya produksi dan ekspor. Sementara itu,

dukungan konektivitas, serta pasokan energi dan SDM yang memadai. Dalam jangka menengah, Pemerintah fokus untuk mengembangkan 9 kawasan industri di luar Jawa.

**Dari sisi penerapan kemajuan teknologi, Pemerintah**

<sup>3</sup> Penjelasan secara rinci telah diulas pada LPI 2018 Bab 2 Boks 2.1 - Mendorong Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor.

**mengarahkan implementasi kebijakan *Making Indonesia 4.0* melalui sejumlah langkah.**

Langkah pertama, implementasi kebijakan dimulai dengan mengukur tingkat kesiapan pelaku industri dalam menerapkan industri 4.0. Berdasarkan asesmen pemerintah, industri manufaktur Indonesia saat ini cukup siap dalam menerapkan industri 4.0. Langkah kedua mengarah pada pembentukan ekosistem inovasi melalui pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0. Langkah ketiga, penyiapan kerangka regulasi dan insentif telah dipersiapkan melalui rancangan Perpres tentang peta jalan *Making Indonesia 4.0* dan *super deductible tax* untuk menjamin implementasi kebijakan secara luas. Langkah keempat dilakukan melalui penggalan ide inovasi dan pembinaan perusahaan *start-up* berbasis teknologi industri 4.0. Langkah kelima diarahkan pada penyelenggaraan *international investor roadshow* untuk mengkampanyekan kebijakan pemerintah kepada dunia internasional. Langkah keenam berfokus pada penyiapan SDM industri dan fasilitasi IKM melalui program *link and match* antara SMK dengan industri dan melalui pelatihan *e-smart* IKM.

**Untuk “P” kedua terkait perbaikan pengaturan dan kelembagaan, kebijakan ditempuh melalui perbaikan regulasi dan insentif dari Pemerintah untuk mendorong investasi dan ekspor sehingga mendukung transformasi manufaktur yang lebih berdaya saing.** Dukungan kelembagaan dilakukan melalui penyederhanaan, sinkronisasi dan harmonisasi regulasi terkait perizinan investasi sehingga dapat menopang prospek investasi

di industri manufaktur. Selain kelembagaan, dukungan pemerintah melalui pemberian insentif bagi industri untuk mendorong kegiatan ekspor, investasi dan upaya peningkatan nilai tambah ekonomi juga akan dapat mendukung transformasi manufaktur.

**Adapun “P” terakhir yang berhubungan dengan penguatan kerja sama perdagangan dan promosi, serta kebijakan yang ditempuh guna meningkatkan akses ke pasar global.** Sejumlah perjanjian perdagangan yang saat ini dalam tahap negosiasi atau ratifikasi perlu dioptimalkan guna mendukung tujuan tersebut. Melalui fasilitasi dan promosi perdagangan oleh Pemerintah, strategi ini diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi produk ekspor manufaktur ke pasar nontradisional. Selain itu, peningkatan analisis pasar, khususnya penguatan *market intelligence* perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kemampuan dalam memahami karakteristik tren permintaan global.

**Strategi kebijakan transformasi manufaktur juga ditempuh secara terintegrasi.** Pemenuhan kebutuhan bahan baku melalui impor yang masih tinggi tidak terlepas dari integrasi rantai pasokan bahan baku antarkawasan dalam rantai produksi

(*local value chain*) yang masih rendah. Sebagai contoh, berdasarkan analisis pada *Inter Regional Input Output* (IRIO) 2015, industri otomotif yang saat ini sebagian besar berada di pulau Jawa memiliki integrasi yang rendah dengan wilayah lain sebagai pemasok input antara. Integrasi rantai pasokan di industri otomotif yang terbatas itu disebabkan oleh perbedaan spesifikasi produk industri pendukung domestik seperti baja, plastik, karet, aluminium, dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga impor bahan baku produk industri pendukung otomotif masih tinggi. Melalui upaya peningkatan nilai tambah, kawasan luar Jawa dapat memasok bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan industri di Jawa yang saat ini bergantung pada impor. Dengan demikian, perlu upaya peningkatan integrasi spasial pada industri otomotif dari sejumlah industri pendukung di sejumlah wilayah, dan dilakukan secara bertahap dalam jangka menengah. Melalui upaya tersebut, ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor dapat semakin menurun sehingga mendukung ketahanan eksternal.

**Peran penting integrasi dalam mendukung penguatan sektor industri manufaktur tergambar pada sejumlah contoh sukses.** Pada industri logam, terdapat





pengembangan kawasan industri terintegrasi *Indonesia Morowali Industrial Park* (IMIP). Morowali dipilih sebagai lokasi IMIP karena sumber daya alam nikel tersedia di kabupaten Morowali, selanjutnya nikel diproses menjadi produk turunan dan diekspor. Seluruh proses, termasuk ekspor-impor dilakukan di dalam lingkungan IMIP. Mulai dikembangkan sejak 2014, IMIP kini menjadi kawasan industri dengan rantai produksi baja terlengkap di dunia. Saat ini, terdapat lima industri logam yang beroperasi di IMIP dengan pangsa ekspor mencapai 54% dari total ekspor besi baja nasional. Secara keseluruhan, IMIP berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan perekonomian daerah, baik melalui ekspor maupun penyerapan tenaga kerja, termasuk melalui pendirian politeknik untuk menjamin pasokan tenaga kerja berkeahlian sesuai kebutuhan. Contoh lainnya, kebutuhan akan karet sintetis untuk

mendukung produksi ban sebagian besar masih diimpor. Dengan kerja sama antara produsen karet dan produsen ban oleh sejumlah pelaku industri, diharapkan pemenuhan kebutuhan karet sintetis yang sebagian besar diimpor semakin berkurang.

**Terakhir, transformasi manufaktur juga tetap perlu dilakukan secara inklusif guna memberikan dampak yang luas kepada masyarakat.**

Peningkatan ekspor ke pasar global dapat mendukung upaya transformasi manufaktur, namun hal tersebut perlu didukung oleh integrasi ke *global value chain*. Peran sektor informal yang mendominasi perekonomian tercermin dari jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai lebih dari 60 juta. Hal ini menandakan bahwa UMKM secara strategis berperan dalam menopang kinerja dan prospek perekonomian. Namun demikian, UMKM saat ini masih dihadapkan

pada tantangan besar terkait inovasi, sehingga UMKM yang terkoneksi dengan *global value chain* jumlahnya masih terbatas dan kontribusinya terhadap ekspor juga masih perlu terus didorong. Mengingat peran strategis UMKM tersebut, Bank Indonesia terus berupaya mendorong pengembangan UMKM siap ekspor dengan fokus pada komoditas unggulan daerah yang berpotensi untuk menjadi komoditas unggulan ekspor dan mendukung pendukung kinerja sektor pariwisata. Di samping itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia juga turut memfasilitasi perluasan jangkauan akses produk UMKM melalui *go digital*. Lebih jauh, tantangan terkait inovasi yang masih dihadapi oleh UMKM juga perlu mendapat dukungan Pemerintah melalui skema pengembangan inovasi dalam bentuk pembangunan pusat teknologi dan inovasi yang hasilnya dapat dirasakan secara luas dan bersifat inklusif.

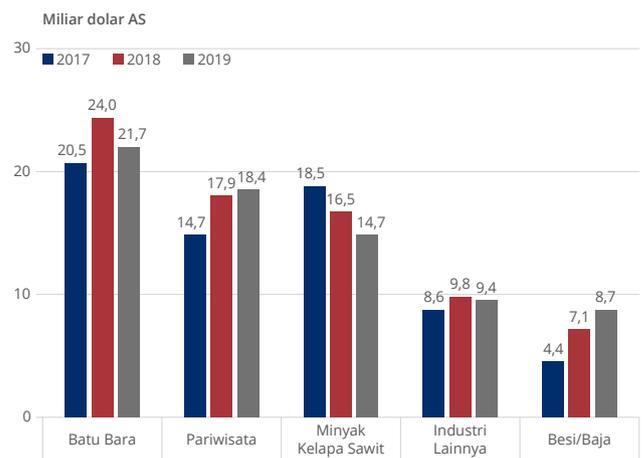
## 4.2

# Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Baru

**Kinerja sektor pariwisata yang makin meningkat berpotensi untuk memperkuat struktur ekonomi dan mendukung percepatan transformasi ekonomi.** Hal ini tercermin pada perolehan devisa pariwisata yang terdiri dari *travel* dan transportasi mencapai 18,4 miliar dolar AS pada 2019, lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, penerimaan devisa pariwisata terus meningkat dengan rata-rata per tahun mencapai 14,5 miliar dolar AS. Jika dibandingkan dengan ekspor jasa lainnya, pangsa devisa pariwisata merupakan yang tertinggi, yakni mencapai 54% terhadap total ekspor jasa. Pangsa tersebut juga menunjukkan tren peningkatan dari 2014 yang tercatat sebesar 44% terhadap total ekspor jasa. Surplus neraca jasa pariwisata juga terjaga, ditopang oleh devisa pariwisata yang konsisten meningkat. Selain itu, di tengah kontraksi ekspor komoditas utama dalam beberapa tahun terakhir, kinerja pariwisata yang membaik menempatkan nilai devisa sektor pariwisata terbesar kedua setelah ekspor batu bara (Grafik 4.4).

**Potensi sektor pariwisata tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.** Hal ini tercermin dari kinerja sektor pariwisata yang tetap terjaga pada 2019 di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Kunjungan wisman dan perolehan devisa tetap tumbuh positif. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata juga lebih baik dibanding tahun 2018 yang mencapai 10,3%. Secara sektoral, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata merupakan terbesar keempat. Potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru didukung oleh daya saing pariwisata yang membaik. Peringkat daya saing Indonesia

**Grafik 4.4.** Sektor Penyumbang Devisa Tertinggi Berdasarkan Komoditas



Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah

berdasarkan *Travel & Tourism Competitiveness Index* (TTCI) meningkat secara signifikan. Bila pada 2010 daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-81, maka pada 2019 meningkat signifikan menjadi peringkat ke-40. Perbaikan daya saing tersebut terutama terjadi pada aspek *regulatory framework*, dan *tourism & travel policy* yang semula berada pada peringkat ke-113 menjadi peringkat ke-4. Berbagai kebijakan pengembangan pariwisata yang secara agresif diterapkan pada beberapa tahun terakhir melalui penetapan destinasi prioritas dan superprioritas berkontribusi positif pada perbaikan peringkat tersebut.

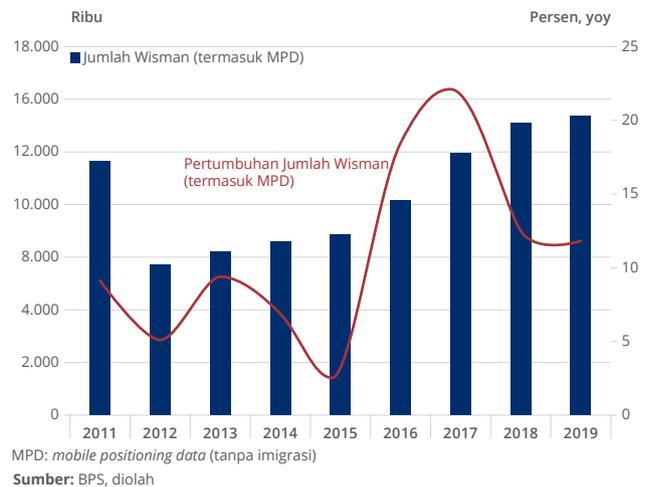
**Potensi alam dan budaya Indonesia yang diakui dunia turut menopang perkembangan sektor pariwisata.** Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia

menjadi destinasi populer dunia ke-4 berdasarkan *Trip Advisor Traveler's Choice 2020*, dan posisi ke-9 pada *Agoda Top 10 City Destination 2019*. Selain Bali, Indonesia masih memiliki potensi destinasi berbasis *natural* dan *cultural* yang sudah cukup dikenal di tingkat global, di antaranya Lombok, Labuan Bajo, Borobudur, Raja Ampat, dan Danau Toba. Potensi destinasi wisata Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara *peers* sebagaimana tercermin pada peringkat indikator *natural and cultural resources* pada *Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)* yang lebih baik.

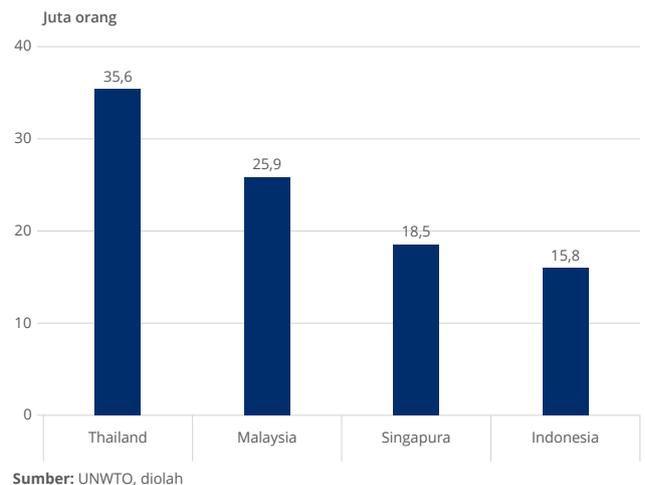
**Peluang untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru ditopang oleh permintaan pariwisata global yang terus meningkat.** Berdasarkan proyeksi UNWTO, jumlah kunjungan wisatawan hingga 2030 diperkirakan mencapai 1,8 miliar orang, atau meningkat 300 juta orang dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada 2019. Peluang Indonesia masih cukup luas untuk memanfaatkan potensi tersebut. Saat ini kunjungan wisman Indonesia mencapai 16,1 juta orang pada 2019, atau setara dengan 1,07% dari jumlah kunjungan wisatawan global (Grafik 4.5). Jumlah tersebut berpotensi untuk ditingkatkan, khususnya jika dibandingkan dengan negara *peers* seperti Thailand dan Malaysia dengan jumlah wisman masing-masing telah mencapai 35,6 juta dan 25,9 juta orang pada 2018 (Grafik 4.6). Selain itu, *tourism cycle* di berbagai destinasi potensial di Indonesia juga masih dalam tahap *exploration* yang mencerminkan kapasitas kunjungan masih cukup tinggi, di antaranya Labuan Bajo, Raja Ampat dan Danau Toba.<sup>4</sup>

**Secara keseluruhan, peningkatan daya saing menjadi aspek penting dalam mendukung kinerja pariwisata.** Salah satu indikator kinerja pariwisata utama ialah peringkat indeks daya saing pariwisata pada TTCI yang lebih baik dari negara *peers*. Pentingnya peringkat indeks daya saing tersebut terkonfirmasi dari hasil pemetaan antara indeks daya saing pariwisata TTCI dengan pertumbuhan kunjungan wisman berbagai negara yang menunjukkan korelasi positif (Grafik 4.7). Capaian daya saing Indonesia pada 2019 yang berada pada peringkat ke-40 sudah lebih baik dibandingkan dengan peringkat pada 2017. Ke depan, masih terdapat ruang peningkatan agar daya saing pariwisata Indonesia

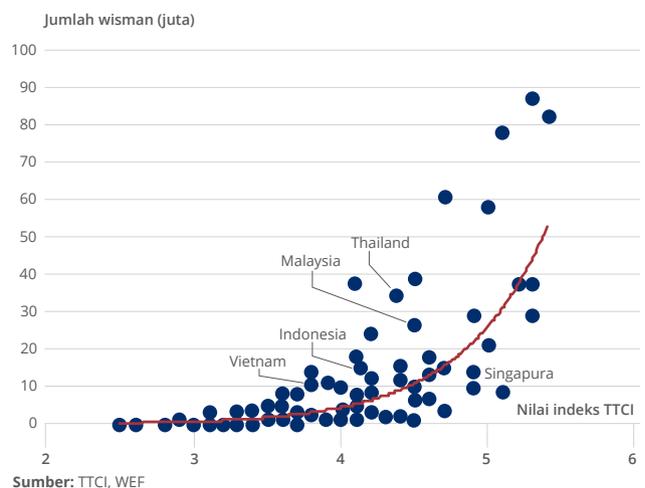
**Grafik 4.5.** Jumlah Kunjungan Wisman Indonesia



**Grafik 4.6.** Jumlah Wisman Negara *Peers* 2018

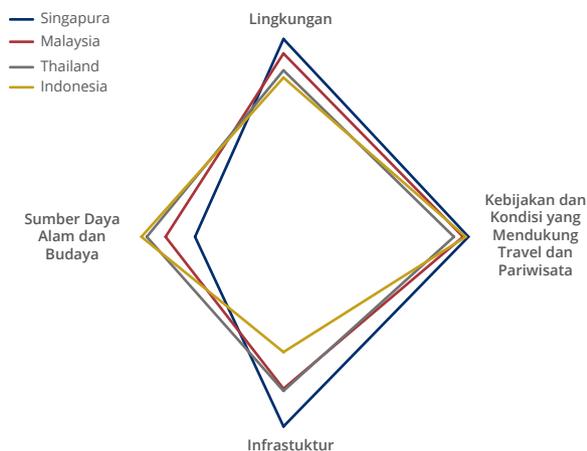


**Grafik 4.7.** TTCI dengan Pertumbuhan Kunjungan Wisman



<sup>4</sup> *Tourism cycle* oleh Butler, 1980, merupakan analisis tahapan pengembangan pariwisata berdasarkan aspek interaksi lingkungan, makhluk hidup dan sosial-ekonomi. Tahap *exploration* mencerminkan kondisi destinasi yang masih memiliki keunggulan alam yang original dan efek sosial yang minimal.

**Grafik 4.8.** Perbandingan Komponen Daya Saing Pariwisata Indonesia



Sumber: TTCI, WEF

dapat sejajar dengan negara *peers* seperti Thailand, Malaysia dan Singapura yang berada pada peringkat 25 teratas. Dari empat indikator, beberapa indikator dapat diprioritaskan untuk dikembangkan lebih baik untuk meningkatkan peringkat daya saing Indonesia, antara lain infrastruktur dan *enabling environment*. Adapun kinerja indikator daya saing *natural & cultural resources* serta *Travel & Tourism (T&T) Policy & enabling conditions* sudah lebih baik dibanding negara *peers* namun perlu tetap ditingkatkan (Grafik 4.8).

**Strategi penguatan kinerja sektor pariwisata ditempuh melalui strategi 3A2P (Akses, Atraksi dan Amenitas – Promosi dan Pelaku Pariwisata) dan didukung sinergi kebijakan.**

Pada 2019 pengembangan 3A difokuskan pada penyediaan Akses, Atraksi dan Amenitas yang berkualitas melalui (i) peningkatan kapasitas bandara di pintu masuk utama, (ii) penguatan *branding* dan *story* destinasi, serta (iii) mengembangkan jaringan hotel internasional. Pada aspek pelaku, transformasi ditempuh

melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan sertifikasi yang mendukung peningkatan kualitas SDM. Transformasi pada aspek promosi ditempuh melalui promosi intensif melalui media digital, *online travel agent*, dan perluasan *hotdeals*. Sinergi antarpemangku kebijakan turut mendukung transformasi melalui koordinasi dan penyelesaian *bottleneck* pengembangan pariwisata. Dalam implementasinya, fokus pengembangan 3A2P tersebut dilakukan pada 5 destinasi superprioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, serta beberapa destinasi utama lainnya seperti Jakarta, Bali dan Kepulauan Riau. Implementasi strategi 3A2P tersebut diharapkan dapat mendukung perbaikan peringkat daya saing Indonesia lebih baik dari negara *peers* (Gambar 4.3).

**Pengembangan infrastruktur dasar menjadi prioritas dalam upaya peningkatan daya saing sektor pariwisata.** Prioritas tersebut menjadi dasar pertimbangan Pemerintah dalam menargetkan pengembangan infrastruktur dasar selesai hingga

**Gambar 4.3.** Strategi Pengembangan Pariwisata



Sumber: Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata

2020. Pengembangan infrastruktur dasar terutama pada infrastruktur konektivitas dari luar negeri ke Indonesia dan antardestinas wisata di Indonesia. Untuk mendukung upaya pengembangan infrastruktur tersebut, pengembangan bandara difokuskan pada kelima destinasi superprioritas yang saat ini masih beroperasi dengan kapasitas terbatas. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan maskapai penerbangan untuk mengatasi kendala layanan transportasi yang terbatas, khususnya di Danau Toba, Labuan Bajo, dan Lombok.

**Kualitas atraksi dan amenitas juga diperkuat di masing-masing destinasi untuk meningkatkan daya saing sumber daya alam dan budaya.** Pada aspek atraksi, daya saing Indonesia sudah cukup baik, meskipun aspek *point of interest* perlu terus menjadi perhatian terkait dengan perlunya penguatan pada *branding* dan *story* destinasi. Untuk meningkatkan persepsi positif wisman, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan pengembangan atraksi pada 2019 yang salah satunya dilakukan melalui penguatan *branding*. Selain itu, peningkatan daya saing amenitas juga telah diakomodir Pemerintah melalui pengembangan amenitas yang berkualitas, yaitu melalui jaringan hotel internasional bekerja sama dengan investor. Jaringan hotel internasional sudah terbangun di beberapa destinasi superprioritas seperti Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur-Joglosemar, namun masih diperlukan upaya ekstra untuk pengembangan di Danau Toba dan Likupang. Dalam pengembangan amenitas tersebut, Bank Indonesia turut berperan melalui program elektronifikasi sistem pembayaran di beberapa destinasi wisata, seperti Labuan Bajo dan Borobudur.

**Promosi intensif melalui media digital, *online travel agent*, dan perluasan *hotdeals* turut mendukung peningkatan daya saing T&T Policy.** Peningkatan daya saing tersebut terutama pada aspek *branding* pariwisata yang lebih baik. Promosi intensif berbasis media digital yang dilakukan oleh pemerintah ke negara-negara Eropa, Amerika, Tiongkok, dan Timur Tengah dengan tingkat kunjungan ke Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan yang dilakukan oleh negara *peers*. Selain itu, pemerintah juga membantu perluasan *awareness branding* pariwisata Indonesia dan promosi pariwisata melalui peningkatan kerja sama dengan *online travel agent* dan *hotdeals* yang diharapkan dapat secara langsung meningkatkan kunjungan wisman.

**Peningkatan kualitas pelaku juga memengaruhi daya saing *enabling environment*.** Peningkatan kualitas

---

## “Penguatan sektor pariwisata didukung sinergi antarpemangku kebijakan”

---

pelaku ditempuh melalui pemberian sertifikasi pelatihan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan suplai tenaga kerja terampil dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, dengan permintaan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang terus meningkat, perlu perumusan pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk mempersiapkan SDM yang tepat dari sisi kuantitas dan kualitas. Peningkatan kualitas pelaku perlu didukung dengan ketersediaan investasi dan pembiayaan. Untuk itu, pemerintah mendorong peningkatan promosi investasi pariwisata serta penetapan petunjuk teknis (*juknis*) penyaluran KUR. Kebijakan promosi investasi pada berbagai even internasional secara rutin dilakukan oleh kementerian dan pelaku usaha terkait. Selain itu, penetapan *juknis* penyalur KUR pada Maret 2019 diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku pariwisata dari perbankan. Keseluruhan upaya tersebut akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata yang juga merupakan salah satu indikator *output* pariwisata.

**Penguatan sektor pariwisata juga didukung sinergi antarpemangku kebijakan, yang salah satunya**



### **diperkuat melalui pembentukan Sekretariat Bersama (SekBer).**

Untuk memperkuat sinergi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman No.109 Tahun 2019 tentang Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata, yang beranggotakan kementerian terkait dan Bank Indonesia. Melalui SekBer tersebut, dilakukan koordinasi dan evaluasi kemajuan transformasi sektor pariwisata secara rutin. SekBer juga turut berkoordinasi dengan pelaku pariwisata di seluruh destinasi dan instansi terkait untuk mengidentifikasi dan melakukan koordinasi penyelesaian *bottle neck* pengembangan pariwisata di berbagai daerah.

**Salah satu contoh implementasi transformasi pariwisata yang berjalan cukup baik berdasarkan aspek 3A2P adalah pengembangan pariwisata di Borobudur-Joglosemar.** Pemerintah mengembangkan seluruh aspek 3A2P terintegrasi untuk mendukung kesiapan Borobudur-Joglosemar sebagai *new Bali* dengan target

kunjungan wisman hingga 2 juta orang. Pada aspek aksesibilitas, proyek bandara Yogyakarta *International Airport* dengan kapasitas penumpang 8 juta per tahun selesai sesuai target pada Desember 2019. Peningkatan kualitas amenitas melalui pembangunan jaringan hotel internasional didukung oleh kemudahan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang sudah berjalan relatif baik. Beberapa kendala terkait pembebasan lahan dikoordinasikan dengan baik dan diperkirakan akan selesai pada 2020. Penguatan atraksi melalui integrasi antardaerah pendukung seperti Dieng, Solo, Yogyakarta, dan Semarang juga berjalan baik, tercermin dari pembangunan konektivitas antardaerah pendukung seperti tol Bawen-Yogyakarta, Solo-Jogjakarta yang masih *on track* selesai pada 2021. Pada aspek pelaku, pengembangan sejumlah desa wisata berbasis UMKM yang menawarkan produk UMKM berkualitas juga sudah menjadi bagian atraksi utama di antaranya Desa Wanurejo, Tanjung Sari dan Majaksingi. Promosi juga secara intensif terus dilakukan baik oleh pemerintah pusat, maupun

pemerintah daerah melalui pameran pariwisata di luar negeri, promosi digital serta kerja sama dengan *travel agent*.

### **Sinergi kelembagaan yang kuat menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan transformasi pariwisata di Borobudur-Joglosemar.**

Sinergi yang dilakukan bertujuan untuk mendukung kelancaran koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari dua provinsi (DI Yogyakarta dan Jawa Tengah). Sinergi di Borobudur-Joglosemar juga diperkuat dengan peran aktif Badan Otoritas Borobudur (BOB) yang bertanggung jawab dalam penyusunan rencana dan strategi pengembangan kawasan, melakukan koordinasi, dan membantu menyelesaikan permasalahan strategis dalam pengembangan kawasan. Dukungan kuat dari Kementerian terkait, serta ketersediaan pembiayaan turut menopang peran aktif BOB dalam mengembangkan kawasan Borobudur secara lebih terintegrasi.

### **Ke depan, upaya penguatan sektor pariwisata tetap berlanjut melalui beberapa strategi.**

Pengembangan pariwisata diperkuat pada destinasi superprioritas serta destinasi unggulan lainnya, yaitu Bali, Wakatobi, dan Bromo-Tengger-Semeru dalam kerangka 3A2P. Dalam kaitan ini, pengembangan infrastruktur konektivitas tetap diprioritaskan di seluruh destinasi. Pada jangka pendek, penyelesaian hambatan administrasi untuk operasionalisasi pengembangan bandara Ngurah Rai, dan Soekarno-Hatta untuk penerbangan internasional perlu dipercepat. Penyelesaian pembangunan jalur kereta Yogyakarta dengan





Yogyakarta International Airport (YIA) mendukung percepatan pemindahan rute penerbangan internasional dari bandara Adi Sucipto. Pada infrastruktur pelabuhan, prioritas jangka pendek adalah untuk menyelesaikan persyaratan administrasi operasionalisasi pelabuhan Gili Mas, Lombok.

**Pengembangan atraksi dan amenitas di destinasi superprioritas tetap dilanjutkan.** Fokus jangka pendek pengembangan atraksi adalah mendukung persiapan penyelenggaraan Moto GP 2021 di Mandalika. Kelancaran penyelenggaraan Moto GP 2021 masih terhambat aspek amenitas khususnya akomodasi yang terbatas. Percepatan penyelesaian beberapa hotel yang sudah direncanakan, serta kerja sama dengan daerah sekitar untuk penyediaan akomodasi, dapat dikoordinasikan untuk mengatasi

kendala tersebut. Pada aspek amenitas, pengembangan hotel jaringan internasional khususnya di Danau Toba dan Borobudur, menjadi fokus jangka pendek.

**Program promosi terus diperluas dan kualitas pelaku makin ditingkatkan.** Hal ini mencakup peningkatan *hotdeals*, kerja sama dengan *online travel agent*, serta maskapai internasional. Program promosi melalui MICE juga berpeluang ditingkatkan di tengah kesiapan negara *peers* tujuan MICE utama. Selanjutnya, pada aspek pelaku, berbagai program peningkatan kualitas SDM pariwisata tetap dilanjutkan, mencakup sertifikasi dan kerja sama pelatihan dengan hotel internasional.

**Yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan dan perluasan implementasi Manajemen Krisis**

### **Kepariwisata (MKK) di tengah kondisi merebaknya COVID-19.**

Perluasan MKK ke beberapa destinasi utama serta penguatan mekanisme penanganan krisis kepariwisataan menjadi penting untuk menjaga persepsi positif Indonesia dan memberikan kenyamanan bagi wisman. Penanganan yang dilakukan MKK saat ini, terutama di Bali, sejalan dengan *safety measures* yang ditetapkan oleh WHO, antara lain berupa pengecekan suhu tubuh di bandara, kesiapan rumah sakit penanganan COVID-19, informasi pencegahan dan penanganan, serta *crisis center* dan *contact center* penanganan COVID-19. Upaya ekstra untuk menahan penyebaran yang lebih luas juga mencakup penghentian sementara kunjungan wisman dari negara-negara dengan tingkat wabah COVID-19 yang sudah tinggi.

## 4.3

# Ekonomi Keuangan Syariah untuk Pertumbuhan yang Inklusif

**Penguatan peran ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi bagian penting dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.** Keyakinan ini ditopang prinsip dasar ekonomi syariah yang memastikan aktivitas transaksi keuangan didasarkan pada aset atau proyek riil, sehingga ekonomi syariah berperan penting dalam mendukung pengembangan sektor riil dan meningkatkan perekonomian secara berkesinambungan. Dalam implementasinya, pengembangan ekonomi syariah ini dilakukan melalui pengembangan *halal value chain*, antara lain dilakukan dengan penerapan model bisnis berlandaskan pola kemitraan yang beragam, mulai dari skala UMKM hingga usaha besar.

**Peran ekonomi syariah Indonesia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru didukung oleh potensi yang besar dari sisi prospek konsumsi masyarakat muslim dunia di berbagai sektor industri halal.** Nilai konsumsi tersebut diperkirakan akan mencapai 3,2 triliun dolar AS pada 2024.<sup>5</sup> Perkembangan ini memicu berbagai negara di dunia untuk memanfaatkan peluang yang ada dan berupaya menjadi pemain utama dalam industri halal global. Fokus pengembangan industri halal yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini juga menjadi strategi berbagai negara, termasuk yang bukan merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Di antara negara-negara tersebut, Tiongkok menjadi eksportir baju muslim

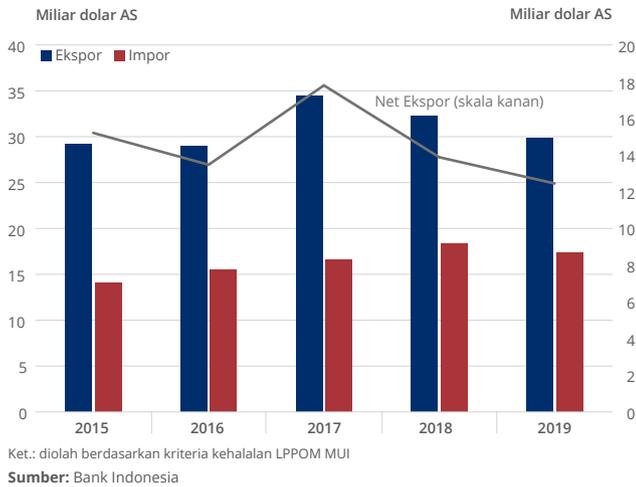
tertinggi ke Timur Tengah, Jepang telah menetapkan industri halal sebagai salah satu sektor ekonomi utama di 2020, Korea Selatan memiliki visi menjadi destinasi wisata halal dunia, dan Thailand saat ini fokus menjadi dapur halal dunia. Selain itu, terdapat Australia dan Brazil, masing-masing menjadi pemasok daging sapi dan unggas halal utama dalam tataran global.

**Potensi ekonomi syariah global memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global dan untuk mengembangkan pariwisata.** Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong sektor industri halal menjadi *market leader*, bukan hanya sebagai target pasar. Bonus demografi membuka peluang besar bagi pelaku industri halal nasional untuk mendorong produksi dan menjadi pemain utama dalam industri halal global. Peningkatan produksi tersebutnya selanjutnya berpotensi untuk memperbesar ekspor produk halal Indonesia ke pasar global, baik pada sektor makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik, maupun fesyen. Potensi ini setidaknya tercermin dari nilai ekspor bahan makanan halal Indonesia yang mencapai 29,3 miliar dolar AS sepanjang 2019 (Grafik 4.9). Pada tahun sebelumnya, nilai ekspor bahan makanan halal Indonesia mencapai 15,4% dari total ekspor makanan halal global.<sup>6</sup> Potensi sumber pertumbuhan ekonomi lainnya dari industri halal juga terlihat dari sektor pariwisata

5 State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020, Dinar Standard.

6 Nilai total ekspor makanan halal global berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 mencapai 210 miliar dolar AS pada 2018.

**Grafik 4.9.** Nilai Ekspor Bahan Makanan Halal Indonesia

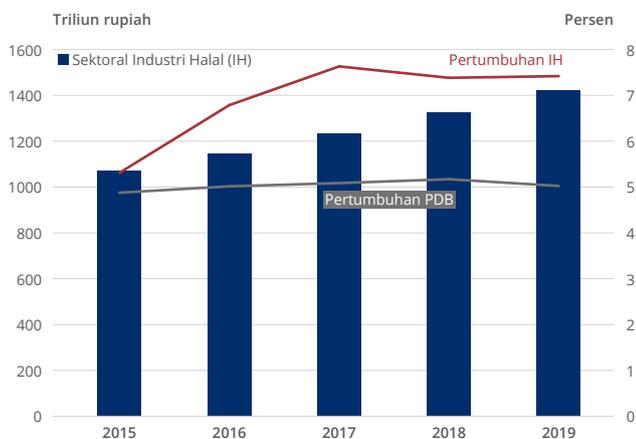


*muslim friendly*, dimana Indonesia menempati peringkat pertama pada *Global Muslim Travel Index 2019*.

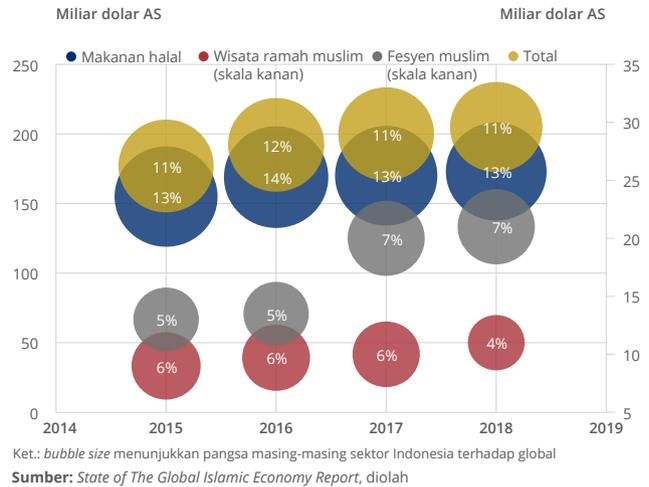
**Potensi ekonomi syariah juga dapat mendukung penguatan sektor industri dan sektor pariwisata.**

Secara pertumbuhan, ekonomi syariah menunjukkan perkembangan akseleratif, ditopang industri halal dan keuangan syariah. Kondisi tersebut mendukung peningkatan kontribusi ekonomi syariah dalam perekonomian nasional. Hal ini antara lain terlihat dalam lima tahun terakhir dimana kinerja ekonomi syariah domestik terus menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan PDB secara umum. Kondisi ini antara lain dapat dilihat dari sektoral industri halal seperti makanan dan minuman halal, fesyen muslim, dan pariwisata ramah muslim (Grafik 4.10).

**Grafik 4.10.** Industri Halal Domestik dan PDB



**Grafik 4.11.** Pangsa Pasar Syariah Indonesia terhadap Syariah Global 2018



**Dalam perkembangannya, kontribusi ekonomi syariah di Indonesia terus meningkat pada tataran global.**

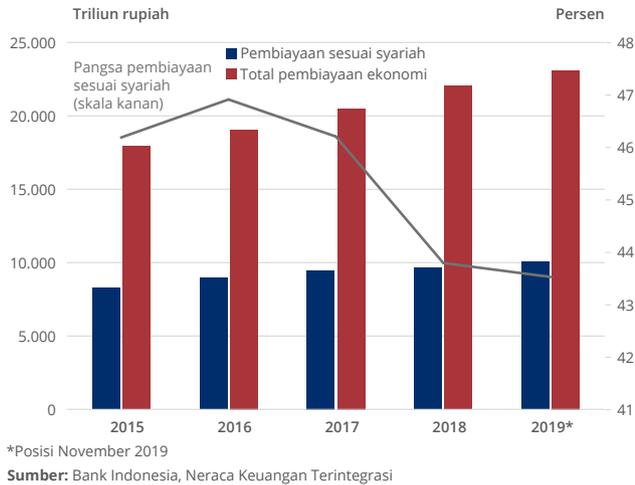
Potensi besar Indonesia terlihat dari nilai sektoral industri halal ini yang terus meningkat, dengan pangsa mencapai sekitar 11% dari pasar global, disumbang industri makanan halal, fesyen, dan wisata ramah muslim (Grafik 4.11). Kondisi tersebut tidak saja memperlihatkan potensi Indonesia yang masih terbuka lebar, namun juga urgensi dari transformasi ekonomi dan keuangan syariah nasional perlu diarahkan agar tidak sekadar menjadi target pasar negara lain.

**Upaya peningkatan produksi industri halal, serta ekonomi syariah secara umum, pada gilirannya turut meningkatkan permintaan terhadap pembiayaan yang juga sesuai dengan prinsip syariah.**

Untuk itu, dibutuhkan inovasi produk-produk pembiayaan syariah yang dapat menjawab kebutuhan usaha syariah. Instrumen pembiayaan ekonomi Indonesia yang sesuai prinsip syariah terus mengalami peningkatan (Grafik 4.12), meskipun masih dibutuhkan akselerasi lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan.<sup>7</sup> Sumber pembiayaan ekonomi ini tidak terbatas pada sektor keuangan komersial, namun juga mencakup keuangan sosial syariah (zakat dan wakaf) sebagai alternatif pembiayaan sesuai dengan prinsip penggunaannya.

<sup>7</sup> Berdasarkan Neraca Keuangan Terintegrasi dengan cakupan instrumen pembiayaan ekonomi yang terdiri dari: surat berharga, kredit atau pembiayaan dalam artian luas (tidak hanya mencakup kredit yang diberikan lembaga keuangan), dan ekuitas baik yang terdaftar di bursa maupun tidak.

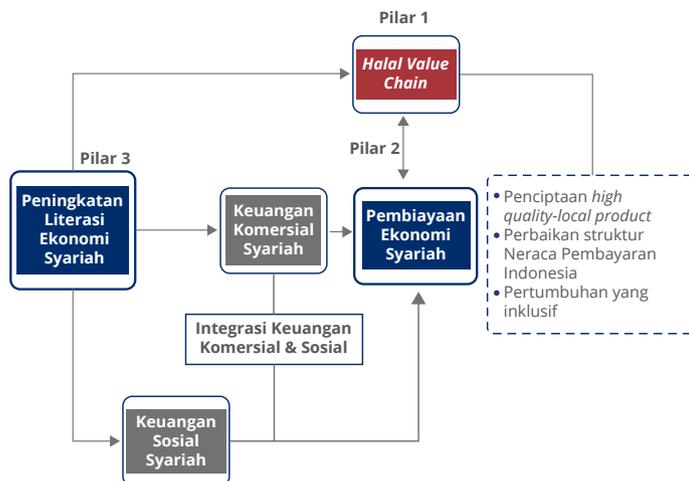
**Grafik 4.12.** Perkembangan Pembiayaan sesuai Syariah



Sejalan dengan upaya transformasi ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi, Bank Indonesia telah menginisiasi strategi pengembangan dalam *Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia*.<sup>8</sup> Strategi dalam *blueprint* menggunakan pendekatan pengembangan ekonomi syariah melalui ekosistem rantai nilai halal atau *halal value chain* (HVC) yang didukung oleh keuangan syariah

melalui penyaluran pembiayaan. Pendekatan terintegrasi ini membutuhkan pemahaman dan literasi ekonomi dan keuangan syariah yang baik dari masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan strategi pengembangan yang saling terkait antara ekonomi syariah pada Pilar 1, keuangan syariah pada Pilar 2, serta edukasi dan sosialisasinya untuk meningkatkan literasi pada Pilar 3 (Gambar 4.4). Ketiga pilar ini utama ini diperkuat dengan pemanfaatan

**Gambar 4.4.** Keterkaitan antar Pilar *Blueprint* Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah



<sup>8</sup> *Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah* Bank Indonesia diluncurkan pada Juni 2017.

teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi serta akselerasi jangkauan implementasi.

**Strategi pengembangan ekonomi syariah melalui ekosistem HVC tidak hanya mencakup pelaku usaha syariah di berbagai tingkatan, tapi juga mencakup infrastruktur industri halal dan aspek kelembagaan.** Dari sisi area sektoral, program pengembangan difokuskan pada sektor utama syariah yang mencakup sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim termasuk kosmetika, dan pariwisata ramah muslim (PRM). Dari sisi pelaku usaha syariah, pengembangan ekosistem dilakukan baik melalui peningkatan kapasitas UMKM dan penguatan kemandirian ekonomi pesantren, maupun melalui pengembangan *linkage-kemitraan*. Pengembangan *linkage-kemitraan* ini merupakan fokus utama dalam pengembangan setiap unit dalam suatu HVC. Kemitraan dapat terbentuk antar-UMKM syariah, pesantren, sampai kemitraan dengan usaha skala besar dan industri. Aspek pengembangan dengan pendekatan inilah yang akan mendorong inklusivitas dalam perekonomian. Strategi pengembangan HVC sendiri mencakup rantai unit lokal yang ditujukan untuk mengembangkan substitusi impor, dan rantai unit global untuk memperkuat ekspor industri halal Indonesia. Untuk itu, dari sisi infrastruktur dan kelembagaan industri halal, pembentukan kawasan industri halal merupakan salah satu syarat akselerasi sektor industri halal.

**Bank Indonesia sebagai otoritas moneter juga melakukan penguatan kerangka kebijakan moneter dan pendalaman pasar keuangan berdasarkan prinsip syariah guna mendorong pembiayaan.** Hal ini

salah satunya terwujud melalui Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) yang merupakan instrumen moneter syariah yang dapat diperdagangkan. Instrumen moneter ini sekaligus dapat menjadi instrumen pendalaman pasar keuangan syariah yang akan meningkatkan efisiensi manajemen likuiditas lembaga keuangan syariah. Dengan meningkatnya efisiensi pasar keuangan, transmisi kebijakan moneter menjadi lebih efektif dan pada gilirannya dapat mendorong pembiayaan syariah untuk menjawab permintaan ekonomi syariah yang sedang berkembang. Tidak kalah penting, kebijakan makroprudensial dengan prinsip syariah juga diarahkan untuk mendukung pembiayaan syariah dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan yang kondusif, dengan bersinergi bersama Kementerian Keuangan dan OJK.

**Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, strategi edukasi dan sosialisasi juga diarahkan secara komprehensif.** Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam menyiapkan sumber daya insani yang andal, profesional, dan berdaya saing. Dalam praktiknya, strategi ini ditempuh melalui penyusunan program edukasi yang memiliki relevansi kuat pada kebutuhan industri, pengembangan kurikulum, pengayaan program vokasi, serta sertifikasi profesi industri ekonomi dan keuangan syariah. Indikator keberhasilan pelaksanaan edukasi tercermin pada tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Semakin tinggi tingkat literasi, semakin besar pula permintaan masyarakat terhadap jasa dan produk berbasis syariah. Di

sisi lain, semakin tinggi kompetensi para pelaku ekonomi dan keuangan syariah, semakin besar peluang Indonesia untuk menjadi pemain aktif dalam penyediaan kebutuhan sektor ini.

**Selain upaya melalui edukasi formal, edukasi non-formal dan sosialisasi dilakukan secara terarah dan berkesinambungan.**

Salah satu implementasi strategi ini ialah penyelenggaraan *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)* secara tahunan. Keberadaan ISEF menjadi wadah bersama yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholders* dan pelaku usaha syariah pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bagi pelaku usaha syariah, ISEF menjadi fasilitas promosi produk-produk halal Indonesia. Bagi kementerian dan instansi terkait lainnya, ISEF menjadi sarana untuk memperkenalkan program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bagi institusi keuangan syariah, ISEF dapat meningkatkan *awareness* dan inklusi masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah. Bagi institusi keuangan sosial syariah, ISEF dapat mendukung upaya penggalangan komitmen



akademisi, asosiasi, dan masyarakat umum, ISEF merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta keilmuan, hingga inklusi secara luas. Strategi penyelenggaraan ISEF yang berskala internasional juga ditujukan untuk menjadikan Indonesia sebagai referensi ekonomi dan keuangan syariah global.

---

“Upaya transformasi ekonomi dan keuangan syariah nasional tetap akan difokuskan dengan pendekatan ekosistem”

---

bersama dalam mengembangkan dan mengoptimalkan keuangan sosial syariah. Sementara itu, bagi

**Strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga telah berevolusi dan terus tereskalasi hingga skala nasional.** Inisiasi Bank



Indonesia untuk mengintegrasikan pengembangan ekonomi syariah dengan keuangan syariah tereskalasi dengan baik sampai ke tataran strategi nasional. Pada 14 Mei 2019, Pemerintah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin oleh Presiden RI, meluncurkan *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). MEKSI merupakan dokumen yang mencakup *Masterplan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang telah diluncurkan sebelumnya pada Agustus 2016. Pada MEKSI, strategi penguatan keuangan syariah merujuk pada MAKSI sehingga strategi pengembangan sudah mengintegrasikan ekonomi dan keuangan syariah. Sementara itu, sejalan dengan strategi yang telah diinisiasi oleh Bank Indonesia, strategi pengembangan ekonomi syariah nasional pada MAKSI turut menitikberatkan pada pengembangan HVC.

**Ke depan, upaya transformasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, tetap akan difokuskan dengan pendekatan ekosistem.** Strategi pengembangan terintegrasi bahkan terus diperkuat dengan penerbitan Perpres nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Perpres tersebut memperkuat fokus strategi peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejalan dengan rencana pembangunan Pemerintah, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan meliputi (i) pengembangan industri produk halal; (ii) pengembangan industri keuangan syariah; (iii) pengembangan dana sosial syariah; dan (iv) pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

## 4.4

# Pendalaman Pasar Keuangan untuk Pembiayaan Ekonomi

### Transformasi ekonomi perlu ditopang oleh kebijakan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung kesinambungan sumber pembiayaan ekonomi.

Pasar keuangan mempunyai peran strategis sebagai sumber pembiayaan ekonomi, media transmisi kebijakan moneter, dan pendukung stabilitas sistem keuangan. Karakteristik pasar keuangan yang dalam dan likuid dapat mendorong alokasi modal akan lebih efisien sehingga dapat menjadi basis bagi pertumbuhan sumber pembiayaan ekonomi yang baru. Sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi, pembiayaan yang meningkat juga akan mendukung peningkatan akumulasi kapital dan investasi yang berujung pada peningkatan produktivitas, sehingga secara keseluruhan berdampak pada ekonomi yang tumbuh secara berkelanjutan. Selain itu, pasar keuangan yang dalam dan likuid, serta inklusif dan aman, juga dapat meredakan tekanan apabila terjadi gejolak di pasar keuangan sehingga mendukung efektivitas transmisi moneter dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, pasar keuangan dengan instrumen pasar yang bervariasi serta basis investor yang beragam akan berkontribusi

positif dalam mendukung kesinambungan sumber pembiayaan ekonomi.

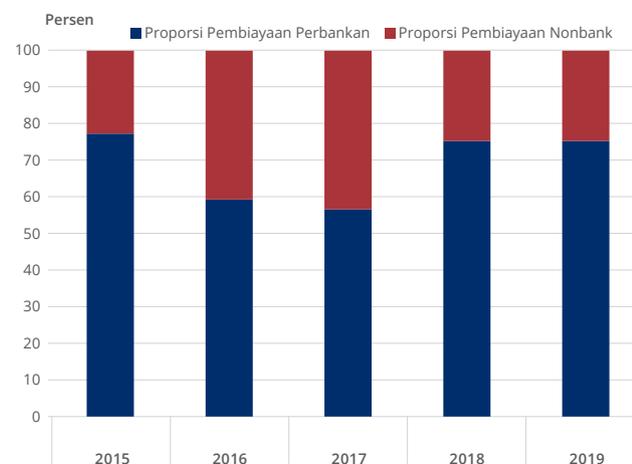
### Kebijakan pendalaman pasar keuangan dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya sumber dan jumlah dana untuk pembiayaan ekonomi, terutama yang berasal dari non-bank (pasar keuangan).

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, sumber pembiayaan ekonomi dari pasar keuangan, yang merupakan ukuran kedalaman ekonomi, masih berada di kisaran 31%. Sekitar 69% sumber pembiayaan ekonomi domestik sampai dengan saat ini masih

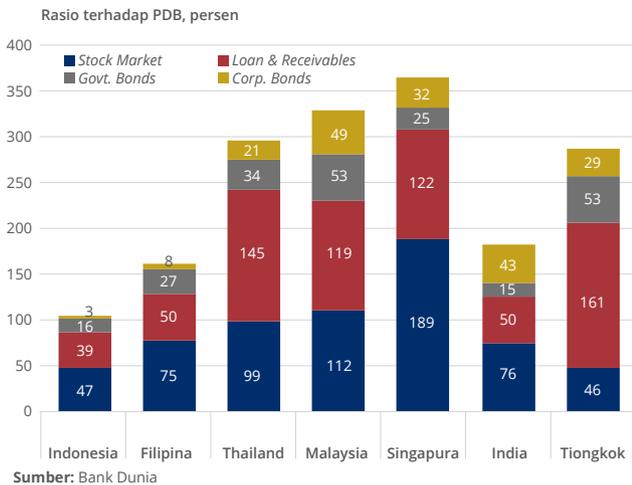
didominasi oleh kredit perbankan (Grafik 4.13). Dominasi pembiayaan perbankan tersebut menyebabkan pilihan akses dana bagi dunia usaha lebih terbatas dan biaya dana (*cost of fund*) tinggi. Di samping itu, tingkat kedalaman pasar keuangan Indonesia juga masih berada di bawah negara *peers* sehingga transformasi pendalaman pasar keuangan perlu terus dilakukan (Grafik 4.14).

### Koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK juga terus diperkuat melalui kerangka Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman

Grafik 4.13. Pembiayaan Ekonomi Indonesia



**Grafik 4.14.** Kedalaman Instrumen Pasar Keuangan

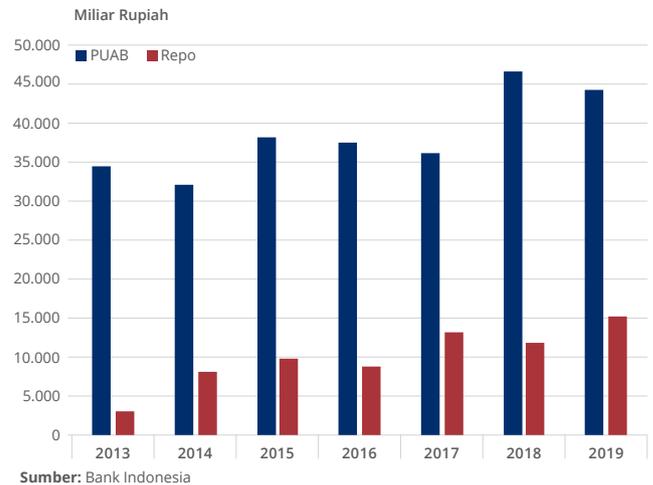


**Pasar Keuangan (SN-PPPK) yang fokus** pada tiga pilar pengembangan. Pilar pertama, yaitu pengembangan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko dilakukan dengan mendorong permintaan dan penawaran terhadap instrumen keuangan. Dari sisi permintaan, hal yang didorong adalah perluasan basis investor, baik investor perorangan domestik maupun institusional. Dari sisi penawaran, hal yang didorong adalah upaya untuk memperkaya alternatif instrumen keuangan, baik untuk pembiayaan maupun mitigasi risiko. Permintaan dan penawaran tersebut akan berinteraksi secara sehat dan dinamis melalui lembaga intermediasi yang kuat. Pilar kedua, yaitu pengembangan infrastruktur pasar keuangan, difokuskan pada upaya membangun infrastruktur pasar keuangan yang memungkinkan akses informasi, mendukung pembentukan harga di pasar (*price discovery*) dan penyelesaian transaksi yang cepat, aman, dan efisien. Pada pilar ketiga, pendalaman pasar keuangan ditempuh dengan membentuk kerangka regulasi yang integratif, saling mendukung, dan terkoordinasi, serta meningkatkan pemahaman pelaku pasar terhadap produk keuangan.

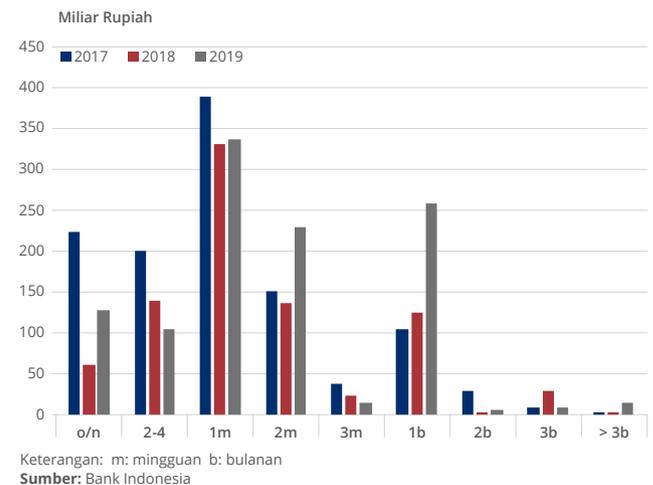
**Implementasi ketiga strategi pengembangan tersebut mendorong perkembangan pasar keuangan Indonesia.**

Di pasar uang, perkembangan pasar repo dapat tetap mendukung pengelolaan likuiditas Rupiah di tenor yang lebih panjang. Pada 2019, volume transaksi repo meningkat yang disertai peningkatan porsi volume transaksi pada tenor lebih dari 1 bulan ke atas, dari 18,7% pada 2018 menjadi 26,1% pada 2019 (Grafik 4.15 dan Grafik 4.16). Sumber pendanaan jangka pendek berupa sertifikat deposito juga mengalami peningkatan pada nilai posisi penerbitan (Grafik 4.17). Di samping itu, Surat

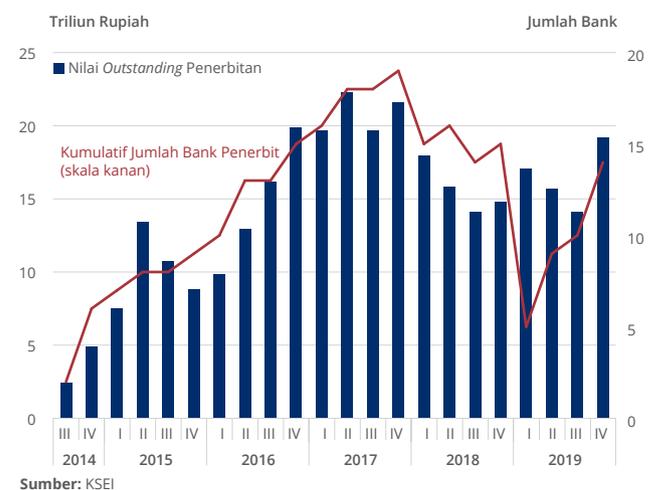
**Grafik 4.15.** Posisi Repo dan PUAB



**Grafik 4.16.** Rata-rata Harian Volume Transaksi Repo berdasarkan Tenor



**Grafik 4.17.** Posisi Sertifikat Deposito





Berharga Komersial (SBK) yang merupakan instrumen pasar uang sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek mulai dimanfaatkan oleh korporasi nonbank yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur. Perkembangan positif juga terlihat di pasar valas yang tetap efisien dan mendukung tetap terkendalinya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Hal tersebut tercermin dari *bid-ask spread* transaksi *spot* Rupiah terhadap dolar AS yang konsisten berada di level rendah. Di samping itu, terdapat peningkatan volume transaksi pada hampir seluruh jenis instrumen derivatif valas untuk lindung nilai, termasuk DNDF. Kondisi pasar keuangan domestik yang semakin dalam dan efisien tersebut pada gilirannya dapat mendukung kesinambungan sumber pembiayaan ekonomi.

**Ke depan, tiga pilar pengembangan dalam SN-PPPK tetap menjadi strategi kebijakan pada jangka menengah (2023-2024).** Prioritas pengembangan dilakukan terutama pada upaya (i) peningkatan partisipasi peminjam dan pemberi dana, peran lembaga intermediari, dan alternatif instrumen keuangan, (ii) peningkatan efisiensi pasar melalui infrastruktur pasar keuangan, dan (iii) penyempurnaan kerangka hukum dan peningkatan kompetensi pelaku pasar. Sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah, pembiayaan ekonomi difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur diperkirakan mencapai 6.445 triliun rupiah (6,2% dari PDB). Dukungan

pembiayaan dari pemerintah diperkirakan hanya mencapai 2.385 triliun rupiah atau 37% dari total kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran swasta dalam mendukung pembiayaan infrastruktur. Dalam hal ini, Pemerintah menciptakan skema pembiayaan untuk mendorong peran swasta, yaitu skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), atau yang dikenal dengan istilah *public-private partnership* (PPP). Skema KPBU terutama difokuskan pada pembiayaan infrastruktur yang layak secara ekonomi, namun marginal secara finansial.

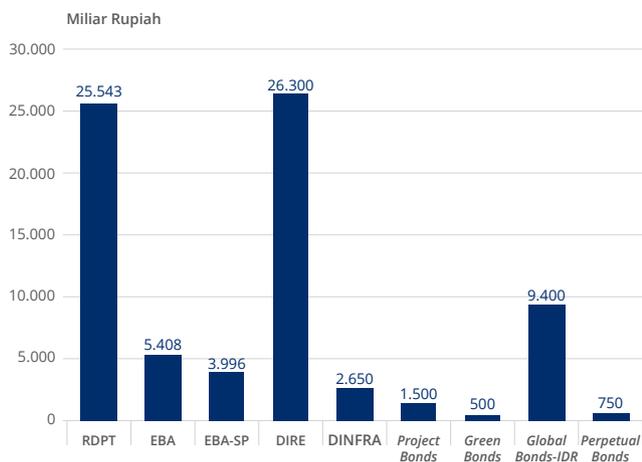
**Berbagai strategi terus dilakukan untuk mendorong peran pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur.** Hal ini

---

“Pasar keuangan domestik yang semakin dalam akan dapat mendukung kesinambungan pembiayaan ekonomi”

---

**Grafik 4.18.** Perkembangan *Innovative Financing* untuk Infrastruktur



Sumber: KSEI, Data per Desember 2019

dilakukan, antara lain melalui pengembangan inovasi pembiayaan infrastruktur (*innovative financing*) yang meliputi Dana Infrastruktur (DINFRA), *Earning Based Assets (EBA)*, *project bonds*, dan *green bonds* (Grafik 4.18). Terkait dengan pengembangan *green bonds*, Bank Indonesia bersama dengan OJK dan Kementerian Keuangan melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan

melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) berkomitmen untuk mengembangkan pembiayaan hijau (*green financing*) di pasar domestik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penerbitan regulasi oleh Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia menerbitkan regulasi tentang IRS/OIS dan DNDF untuk memitigasi risiko suku bunga dan nilai tukar, *loan to value*, dan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) sektor hijau. Sementara itu, OJK menerbitkan regulasi terkait penerbitan *green bonds* dan *sustainable responsible investment*. Dalam mendukung *green bonds* tersebut, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris untuk memfasilitasi *technical assistance* dalam mempersiapkan proyek *green bonds* dan bekerja sama dengan World Bank untuk memfasilitasi *grant assistance*. Selanjutnya, sejak 6 November 2019, Bank Indonesia juga telah menjadi anggota dalam forum *Network for Greening Financial System (NFGD)* yang merupakan forum koalisi bank sentral dan *supervisory agency* untuk mendukung *green financing* pada sistem keuangan. *Green bonds* ini diharapkan dapat memperluas alternatif pembiayaan infrastruktur bagi penerbit, sekaligus mendorong peningkatan minat investor dalam berinvestasi dengan pilihan produk yang beragam.